

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan dan menganalisis temuan yang ada di Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Sidoarjo (Kabupaten Sidoarjo – Kota Surabaya) mengenai Implementasi Kebijakan Penetapan Zonasi Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Surabaya, berdasarkan pada fokus penelitian yaitu 2 (dua) variabel, yaitu *Content of Policy* (Isi Kebijakan) yang mencakup kepentingan, manfaat, derajat perubahan, pengambil keputusan, pelaksana program, serta sumber daya dan *Context of Implemetation* (Konteks Implementasi) yang mencakup kekuasaan, kepentingan, strategi, karakteristik lembaga, serta kepatuhan pelaksana, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan penetapan zonasi Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Surabaya telah berhasil ditetapkan oleh Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Sidoarjo (Kabupaten Sidoarjo – Kota Surabaya).
2. Pada variabel isi kebijakan terdapat 5 indikator yang telah berhasil dilaksanakan dalam penetapan kebijakan zonasi Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Surabaya yaitu indikator jenis manfaat, jangkauan perubahan, kedudukan pengambil keputusan, pelaksana program, dan sumber daya. Hal tersebut telah berhasil dilaksanakan oleh Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Sidoarjo (Kabupaten Sidoarjo – Kota Surabaya) sesuai dengan aturan.

3. Pada indikator kepentingan yang terdapat didalam variabel isi kebijakan belum berhasil mempengaruhi proses penetapan kebijakan zonasi kerana kepentingan masyarakat dalam menanggapi adanya kebijakan zonasi berbeda-beda.
4. Pada variabel konteks implementasi semua indikator yang terdiri dari keuasaan, strategi, karakteristik lembaga, dan kepatuhan serta daya tanggap pelaksana telah berhasil mempengaruhi penetapan zonasi Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Surabaya yang dilaksanakan oleh Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Sidoarjo (Kabupaten Sidoarjo – Kota Surabaya).
5. Berdasarkan variabel dan indikator untuk Implementasi Kebijakan Penetapan Zonasi Sekolah Menengah Atas Negeri di Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Sidoarjo (Kabupaten Sidoarjo – Kota Surabaya) telah terlaksana dengan baik dan sesuai aturan Perkemendikbud, namun terdapat 1 (satu) indikator yang menunjukkan bahwa implementasi tersebut masih terdapat kekurangan dari segi kepentingan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Sidoarjo (Kabupaten Sidoarjo – Kota Surabaya) harus mengakomodasi masukan yang disampaikan masyarakat dalam penetapan zonasi Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Surabaya.